

Hari, tanggal : Kamis, 25 Juli 2024

Waktu : 10.30-11.30 WITA

Tempat : Departemen Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin

Konflik Persaingan Elit Bangsawan Kerajaan Tanete 1814-1910



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**

Oleh

MUHAMMAD HASBI OTOLUWA

F061181321

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

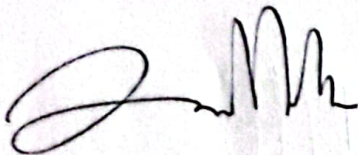
2024

HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN

Sesuai dengan surat penugasan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Nomor 138/UN4.9.3/KEP/2023 Pada tanggal 26 Januari 2023, dengan ini kami menyatakan menerima dan menyetujui skripsi yang berjudul "Konflik Persaingan Elit Bangsawan Kerajaan Tanete 1814-1910" yang disusun oleh Muhammad Hasbi Otoluwa, F061181303 untuk diteruskan kepada panitia ujian skripsi Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Makassar, 3 Juli 2024

Pembimbing I



Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D

NIP. 197410162003121001

Pembimbing II



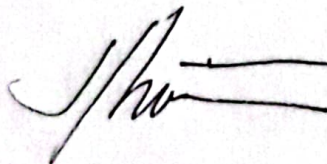
Andi Lili Eyita, S.S., M.Hum

NIP. 199001112019032017

Disetujui untuk diteruskan kepada Panitia Ujian Skripsi.

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Sejarah



Dr. Ilham, S.S., M.Hum

NIP.197608272008011011

PENGESAHAN

Konflik Persaingan Elit Bangsawan Kerajaan Tanete 1814-1910

Oleh

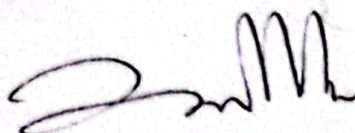
MUHAMMAD HASBI OTOLUWA

F061181303

Skripsi ini telah dipertahankan pada Kamis, 25 Juli 2024 dan dinyatakan lulus serta telah memenuhi sejumlah persyaratan

Telah Menyetujui

Pembimbing I



Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D.

NIP. 197410162003121001

Pembimbing II



Andi Lili Evita, S.S., M.Hum.

NIP. 199001112019032017

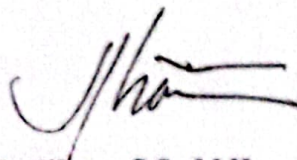
**Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Sejarah Universitas Hasanuddin**




Prof. Dr. Akin Duli, M.A

NIP. 196407161991031010

**Ketua Departemen Ilmu
Universitas Hasanuddin**



Dr. Ilham, S.S., M.Hum

NIP. 197608272008011011

PENGESAHAN UJIAN

**KONFLIK PERSAINGAN ELIT BANGSAWAN KERAJAAN TANETE
1814-1910**

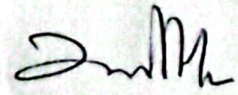
Oleh


MUHAMMAD HASBI OTOLUWA

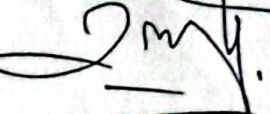
F061181303


Skripsi ini telah diuji pada Kamis, 25 Juli 2024 dan dinyatakan lulus.


- 
1. Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D. Ketua
 2. Andi Lili Evita, S.S., M.Hum. Sekretaris
 3. Dr. Nahdia Nur, M.Hum. Penguji I
 4. Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum. Penguji II
 5. Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D. Pembimbing I
 6. Andi Lili Evita, S.S., M.Hum. Pembimbing II


: 

: 

: 

: 

: 

: 

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Hasbi Otoluwa

Nim : F061181303

Departemen/Program Studi : Ilmu Sejarah/Strata 1 (S1)

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

KONFLIK PERSAINGAN ELIT BANGSAWAN KERAJAAN TANETE 1814-1910

Adalah karya ilmiah saya sendiri. Karya ilmiah ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi (Universitas Hasanuddin). Penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan kaidah penulisan akademik. Apabila di kemudian hari ternyata di dalamnya terdapat unsur-unsur plagiarisme dan tidak dapat dibuktikan dengan metode historiografi, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar 2014



Muhammad Hasbi Otoluwa

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Swt. berkat rahmat dan ridhoNya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul ***“Konflik Persaingan Elit Bangsawan Kerajaan Tanete 1814-1900”*** sebagai syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) guna mendapatkan gelar Sarjana dari Departemen Ilmu sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Sang rahmat bagi alam semesta, beserta para keluarganya yang suci serta para sahabatnya yang diberi petunjuk.

Proses yang dilalui oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini amatlah panjang, penuh lika-liku, serta jalan yang penuh terjal. Tujuh bulan pertama sejak November 2022 penulis awalnya berusaha untuk mempertahankan judul awal penelitian mengenai gerakan politik pekerja di Kota Makassar 1956. Namun karena tidak adanya sumber primer, penulis tidak lagi mampu untuk mempertahankan judul tersebut sehingga pada Jumat 1 September 2024, penulis melaksanakan ujian proposal kembali, sehingga lahirlah judul dan tema penelitian tentang konflik persaingan antar elit bangsawan di Kerajaan Tanete ini.

Sampai pada detik ini penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan sumbangsih baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk pemikiran, materi, serta moril. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Terima kasih kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku pimpinan universitas yang tanpa arahan dari kebijakannya, penulis tidak akan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.
2. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Akin Duli, M.A. beserta jajarannya, yang melalui kebijakannya juga telah membantu secara tak langsung kepada penulis untuk sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.
3. Terima kasih tak terhingga kepada ayahanda Narto Irawan Otoluwa, ibunda Karmila Mokoginta, serta adik Muh. Raihan Farhan Otoluwa dan Muh. Zul Fahmi Goni Otoluwa, atas segala kesabaran, didikan, doa serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
4. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Amrullah Amir, S.S., M.Hum., Ph.D. selaku pembimbing pertama dan Andi Lili Evita, S.S., M.Hum. selaku pembimbing kedua yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dalam rangka memberi ide serta masukannya. Mulai dari membaca hingga memberi koreksi. Terkhusus kepada kakanda Uto, terima kasih telah mengawal dan mendampingi penulis dalam proses penelitian tema ini.
5. Terima kasih kepada Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Dr. Ilham, S.S., M.Hum. yang telah banyak memberikan dorongan serta motivasi dalam proses penyelesaian studi penulis.

6. Terima kasih kepada segenap para dosen Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, atas segala pengorbanan serta ketulusaannya dalam mendidik, membimbing, serta memandu perkuliahan sehingga dengan demikian membuka cakrawala ilmu yang luas kepada penulis. Kepada (Alm.) Prof. Dr. A. Rasyid Asba, M.A., Dr. Bambang Sulistyono Edi P., M.S., Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum., Dr. Muh. Bahar Akkase Teng, LCP. M.Hum., Dr. Nahdia Nur, M.Hum., Dr. Ida Liana Tanjung, S.Pd., M.Hum., Dr. Abd. Rahman Hamid, M.Si., (Almh.) Margriet Moka Lappia, S.S., M.S., Drs. Dias Pradadimara, M.A., Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag., serta kepada Pembimbing Akademik Nasihin, S.S., M.A., yang turut pula memberikan sumbangsih pemikiran serta masukan kepada penulis.
7. Terima kasih kepada bapak Uddji Usman, S.Sos., selaku kepala kesekretariatan Departemen Ilmu Sejarah yang telah banyak membantu dalam proses pengurusan berkas-berkas akademik yang dibutuhkan sejak penulis masih dalam proses perkuliahan hingga selesai.
8. Terima kasih pula penulis haturkan kepada Keluarga besar Humanis KMFIB-UH. Rumah pertama yang menjadi wadah berproses bagi penulis dalam mengembangkan *softskill* serta penalaran keilmuan selama di kampus. Khususnya kepada kawan seperjuangan Muhammad Darwan, S.S., Tirstan Anugerah Ranus, S.S., Fika Saputri, S.S., dan Widya Sari Asis, S.S. Untuk kalian berlima, sampai bersua di fase proses selanjutnya.

9. Terima kasih kepada teman-teman Ilmu Sejarah Angkatan 2018, M. Ahmad Syarif, S.S., Zulkarnain, S.S., Dinal Pramudia Dien, S.S., Usman Salam, S.S., Sultan Abdul Gafur Muhamad, S.S., Musmuliadi, S.S., Muh. Rayhan Farabi Bazergan, S.S., Risma, S.S., Fitrah Arianti, S.S., Nirwana, S.S., Salsabella Anzalta Debi Sunawan, S.S., Hendrawan Rahmat Wijaya, Fajrul Abdillah, Yudi.S, M. Reza Vachlevy, Yuniatiningsih, Najma Wafiyah, Maqfira Sri Amriani, Nur Madaniah, Nurul Ain, Rianalda Devi Aprilia, serta Ulfah. N., atas dukungan serta pemberian motivasi semangatnya kepada penulis.
10. Terima kasih pula penulis haturkan kepada teman-teman Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin angkatan Mosaik 2018, atas dukungan serta dorongan yang diberikan kepada penulis
11. Terima kasih kepada teman-teman HMI Komisariat Ilmu Budaya Unhas, serta teman-teman HMI Se-cabang Makassar Timur. Rumah kedua bagi penulis dalam mengembangkan minat utamanya dalam penalaran kritis serta wacana keislaman.
12. Terima kasih kepada teman-teman Jakfi Makassar. Tempat yang menjadi rumah bagi penulis dalam membuka pintu proses “ jalan kesucian akal serta ruhani “. Terkhusus kepada kakanda Rahmatullah Usman, terima kasih telah menjadi guru sekaligus teman dalam berdiskusi, termasuk dalam memberikan sumbangsih pemikiran serta masukan dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih begitu banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karenanya kritik serta masukan sangat diharapkan oleh penulis, agar dapat lebih mengembangkan lagi kesempurnaan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih intelektual baik secara umum kepada masyarakat, maupun secara khusus kepada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Makassar, 12 Juni 2024

Penulis

Daftar Isi

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Kata Pengantar	i
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR PETA	ix
Daftar Istilah	x
Abstrak	xiii
Abstract	xiv
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.3. Rumusan Masalah	13
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.5. Tinjauan Pustaka	14
1.6. Metode Penelitian	19
1.7. Sistematika Penulisan	20
BAB II Wilayah Dan Struktur Sosial Masyarakat Kerajaan Tanete	23
2.1 Kondisi Wilayah Geografis	23
2.2 Gambaran Penduduk	26
2.3 Kedudukan Bangsawan Dalam Posisi Struktur Sosial	27

BAB III Profil Singkat Para Bangsawan Kerajaan Tanete Yang Terlibat Dalam Konflik Persaingan 1814-1910	33
3.1. Aktor Utama.....	33
3.1.1. La Patau Datu Tanete Matinroe ri Salomoni.....	33
3.1.2. La Rumpang Megga Dulung Ajeng Ale' Datu Lamuru Datu Tanete	34
3.1.3. Retna Kencana Colliq Puji'e Arung Pancana Toa	36
3.1.4. We Tenri Olle Siti Aisyah Datu Tanete	39
3.1.5. La Sangaji Unru Datu Bakka	40
3.2. Aktor Pendukung	42
3.2.1. La Sameggu Daeng Kalebbong Karaeng Sigeri.....	42
3.2.2. La Combong Arung Baring Arung Cinakko	42
BAB IV Jalannya Konflik Persaingan	44
4.1. Kedatangan Belanda Kedua Kali	44
4.2. Perlawanan La Patau	47
4.3. Naiknya La Rumpang Megga Sebagai Raja Tanete	57
4.4. Tanete Pada Masa Pemerintahan We Tenri Olle	66
BAB V Kesimpulan	79
Daftar Pustaka	82
Lampiran-lampiran.....	84

Daftar Gambar

Gambar 1.0. Ratu Tanete We Tenri Olle beserta putrinya We Pancaitana.....38

Daftar Peta

Peta 1.0. <i>Peta Wilayah Kerajaan Tanete</i>	22
---	----

Daftar Istilah

Arung	Posisi jabatan di tingkat wilayah suatu kerajaan
Anakarung	Istilah dalam bahasa Bugis yang berarti bangsawan
Arajang	Benda-benda pusaka yang menjadi simbol kedaulatan bagi suatu kerajaan dalam tradisi Bugis
Bolongnge	Sejenis bendera yang menjadi bagian dari arajang
Datu	Gelar untuk pemimpin tertinggi kerajaan
Elit	Orang atau kelompok tertentu yang memiliki kedudukan terhormat di masyarakat. Dalam analisis Mattulada, elit dalam tradisi masyarakat Bugis secara garis besar terbagi dalam dua aspek : elit feodal tradisional dan elit aristocrat.

Gaukeng	Suatu benda keramat yang kemudian menjadi faktor kunci terhadap pembentukan awal pemukiman di Bugis/Makassar.
Hadat	Posisi di kerajaan yang memiliki wewenang untuk menasihati, mengangkat dan memberhentikan seorang raja dan penguasa wilayah kerajaan
Leen Vorstendom	Status yang diberikan oleh Belanda kepada suatu kerajaan yang kedudukannya adalah kerajaan pinjaman
Pabbicara	Posisi adat dalam kerajaan yang memiliki tugas sebagai hakim yang memutuskan suatu perkara
Palili	Daerah-daerah yang menjadi wilayah utama suatu kerajaan. Untuk kerajaan Tanete sendiri memiliki empat palili, yaitu Lalolang, Lipukasi, Pancana, dan Cinakko

Pacce'/Pesse'

Konsep keyakinan terhadap kesatuan spiritual tiap-tiap individu dalam satu komunitas

Siri'

Secara etimologis berarti rasa malu/harga diri. Dalam tradisi Bugis/Makassar, orang akan rela sampai mempertaruhkan nyawanya agar dapat menegakkan kembali siri'nya

Abstrak

Muh. Hasbi Otoluwa (F061181303) dengan judul “ Konflik Persaingan Elit Bangsawan Kerajaan 1814-1910 “, dibimbing oleh Amrullah Amir, S.S., M.Hum., Ph.D., dan Andi Lili Evita, S.S., M.Hum.

Kajian Konflik Persaingan Elit Bangsawan Kerajaan Tanete 1814-1910 menjelaskan tentang dinamika konflik internal di Tanete, serta apa yang menjadi faktor yang memicu terjadinya konflik persaingan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melacak akar masalah konflik internal yang terjadi antara elit bangsawan Tanete tersebut. Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah dengan melakukan studi literatur. Konflik internal yang terjadi pada rentang periode 1814-1910 merupakan kelanjutan dari perseteruan antara La Maddusila dan La Tenrisessuq. Konflik tersebut berlanjut sampai pada keturunan mereka berdua, yakni antara La Patau dan La Rumpang Megga, dalam memperebutkan supremasi atas Kerajaan Tanete. Setelah itu konflik berlanjut antara internal keturunan La Tenrisessuq sendiri, yang ditandai dengan perseteruan antara Colliq Puji'e dengan puterinya We Tenri Olle, serta We Tenri Olle dengan suaminya sendiri La Sangaji yang sama-sama merupakan keturunan La Tenrisessuq melalui jalur La Rumpang Megga. Selain daripada faktor konflik dikalangan internal istana Kerajaan Tanete, diketahui pula bahwa konflik persaingan yang terjadi pada periode tersebut juga tidak lepas dari intervensi yang dilakukan oleh Belanda, dalam rangka membangun kembali supremasinya di kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan khususnya Kerajaan Tanete. Adapun hasil akhir dari konflik ini adalah berkuasanya secara penuh Belanda terhadap Tanete, sehingga disatu-sisi hal demikian memberikan sumbangsih bagi Tanete dalam perkembangan ekonomi, politik, dan terutama ilmu pengetahuan.

Kata Kunci : *konflik, persaingan, elit, bangsawan, kerajaan tanete*

Abstract

Muh. Hasbi Otoluwa (F061181303) with the title "The Elite Aristocratic Rivalry Conflict in the Kingdom of Tanete 1814-1910," supervised by Amrullah Amir, S.S., M.Hum., Ph.D., and Andi Lili Evita, S.S., M.Hum.

The study on The Elite Aristocratic Rivalry Conflict in the Kingdom of Tanete 1814-1910 explains the dynamics of internal conflicts in Tanete and the factors that triggered these rivalry conflicts. This research aims to trace the root causes of the internal conflicts between the Tanete elite aristocrats. The method used by the author is a literature study. The internal conflict that occurred during the period 1814-1910 was a continuation of the feud between La Maddusila and La Tenrisessuq. This conflict extended to their descendants, namely between La Patau and La Rumpang Megga, in the struggle for supremacy over the Kingdom of Tanete. Subsequently, the conflict continued within La Tenrisessuq's lineage, marked by the feud between Colliq Puji'e and her daughter We Tenri Olle, as well as between We Tenri Olle and her own husband La Sangaji, who were both descendants of La Tenrisessuq through La Rumpang Megga. In addition to the internal conflict among the palace elite of the Kingdom of Tanete, it is also known that the rivalry conflicts during this period were influenced by Dutch intervention, in their efforts to re-establish supremacy in the kingdoms of South Sulawesi, particularly the Kingdom of Tanete. The final outcome of this conflict was the full control of Tanete by the Dutch, which, on one hand, contributed to Tanete's development in terms of economy, politics, and especially knowledge.

Keywords: conflict, rivalry, elite, aristocracy, tanete kingdom

BAB I

Pendahuluan

1.1.Latar Belakang

Konflik merupakan sebuah cara pandang yang melihat bahwa suatu masyarakat merupakan sistem sosial, dimana terdiri atas berbagai macam komponen dan masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lain. Hadirnya teori mengenai konflik tidak lepas dari landasannya untuk mengkritik teori fungsionalisme, yang memandang bahwa masyarakat itu berkembang secara linear dan teratur. Sebaliknya, masyarakat dalam kacamata teori konflik senantiasa dipenuhi oleh unsur dinamika, konflik, serta pertentangan. Sehingga melalui ketiga unsur dalam masyarakat itulah, sistem sosial dibangun dalam nuansa dinamis serta dialektis¹.

Berangkat dari landasan mengapa hadirnya teori konflik diatas, maka dapat ditarik tiga hipotesis yang menjadi dasar atas bangunan mengenai konflik. *Pertama*, bahwa manusia secara dasar memiliki kepentingan dan manusia akan berusaha bagaimanapun juga untuk mencapainya. *Kedua*, dalam relasi sosial kekuasaan merupakan titik sentral yang menjadi sumber munculnya konflik, dan pada dasarnya kekuasaan itu bersifat memaksa. *Ketiga*, ideologi yang lebih cenderung berperan sebagai “senjata” untuk membela kepentingan.

¹ Raho S.V.D Bernard, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta, Prawestasi Pustaka, 2007), hlm. 71.

Persaingan dalam teori sosiologi diartikan sebagai suatu proses interaksi sosial, dimana antara individu atau kelompok manusia saling berebut untuk mencapai tujuannya. Adapun metode yang umum dilakukan dalam persaingan adalah dengan cara saling menarik perhatian, dan seringkali dibarengi dengan masing-masing individu atau kelompok saling mempertajam prasangka antara satu sama lainnya².

Konflik serta persaingan khususnya di antara elit bangsawan bukanlah hal baru jika melihat ruang lingkup sejarah Sulawesi Selatan. Bahkan kita dapat melacak hal tersebut, sampai pada bagaimana awal mula terbentuknya peradaban di beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan. Misalnya tentang kehadiran *Tomanurung Bainea* di Kerajaan Gowa, bermula dari konflik diantara sembilan wilayah *bate salapang* sehingga berkat kehadirannya konflik diantara sembilan wilayah tersebut dapat diredam. Begitupun jika melihat bagaimana kehadiran *Tomanurung ri Matajang* di Kerajaan Bone, dimana sebelum kehadirannya kondisi Bone berada dalam situasi kekosongan pemerintahan, serta para *Matoa Anang*³ yang saling berseteru satu sama lain⁴.

Contoh lain dapat dilihat pada peristiwa konflik antara Raja Bone La Ma'deremmeng dengan ibunya sendiri, Datu Pattiro We Tenrisoloreng. Diceritakan

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 91.

³ Secara etimologis berarti kepala kaum. Model pemerintahan sebelum berdirinya Kerajaan Bone adalah persekutuan yang terdiri atas masyarakat kaum atau yang disebut *Anang*. (sumber : Mattulada, *Latoa : Antropologi Politik Orang Bugis*).

⁴ Leonard Y. Andaya, *Warisan Arung Palakka : Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17* (Makassar, Penerbit Innawa, 2004), hlm. 35-36.

bahwa ketika telah dimulai proses islamisasi di Kerajaan Bone, La Ma'deremmeng mengambil kebijakan untuk menerapkan ajaran Islam secara ketat. Hal tersebut dimulainya dengan langkah mengeluarkan kebijakan larangan terhadap perbudakan. Kebijakannya tersebut lantas menimbulkan reaksi perlawanan dari golongan bangsawan yang diprakarsai oleh ibunya. Datu Pattiro pun akhirnya meminta bantuan sekaligus perlindungan kepada Gowa dalam rangka untuk melakukan perlawanan terhadap putranya tersebut⁵.

Jika ditarik secara asal-usul mengapa konflik bukanlah merupakan hal baru dalam sejarah Sulawesi Selatan (dalam hal ini Bugis/Makassar), maka akan ditemui bahwa yang menjadi pondasi utamanya adalah suatu prinsip yang amat dijunjung tinggi dalam masyarakat Bugis/Makassar, yakni *siri' na pacce*.

Siri' dalam pengertian konseptualnya adalah suatu gagasan tentang rasa malu. Konsep ini dapat dilekatkan pada dua subjek, yakni kepada orang yang telah berbuat pelanggaran, sehingga dengan demikian hal tersebut membuatnya kehilangan *siri'*, dan kepada orang yang telah dibuat *siri'* (dipermalukan). Beban moral akibat *siri'* ini amat besar, sehingga orang akan mengorbankan apapun bahkan termasuk nyawanya agar dapat mengembalikan harga dirinya, sebagaimana bunyi pepatah Bugis yang artinya : Lebih baik mati mempertahankan *siri'* ketimbang hidup tanpa adanya *siri'*. Maka wajarlah kemudian, ketika kita melihat semisal bagaimana konflik yang dilancarkan oleh La Tenritatta Arung Palakka

⁵ *Ibid.*, hlm. 57-58.

terhadap Sultan Hasanuddin di masa lampau, tak lain tak bukan adalah demi menegakkan kembali *siri'* ini⁶.

Pacce'/pesse memiliki arti konsep tentang keyakinan terhadap kesatuan spiritual tiap-tiap individu dalam satu komunitas. Latar belakang munculnya konsepsi ini berangkat dari bagaimana awal mula terbentuknya komunitas/pemukiman di daerah Bugis/Makassar. Pada awalnya, masing-masing komunitas yang telah terbentuk memiliki sebuah benda keramat yang dikenal dengan istilah *gaukeng*⁷. *Gaukeng* inilah yang kemudian menjadi pengikat bagi seluruh anggota komunitas. Maka dapat dikatakan, *pacce'/pesse* adalah suatu emosi spiritual yang memberikan rasa keterikatan pada diri seseorang terhadap komunitasnya, atau pada saat ini dapat diartikan keterikatan pada kampung halamannya. Jika diartikan lebih lanjut, *pacce'/pesse* adalah tumbuhnya rasa empati sebagai bentuk kepedulian sosial seorang individu terhadap komunitasnya⁸.

Salah satu pelanggaran terhadap *siri' na' pacce'* yang dikategorikan pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap hukum atau perjanjian yang telah ditetapkan. Menurut tradisi masyarakat Bugis dahulu, orang atau kelompok yang

⁶ *Ibid.* hlm. 26.

⁷ *Gaukeng* merupakan suatu benda keramat yang kemudian menjadi faktor kunci terhadap pembentukan awal pemukiman di Bugis/Makassar. *Gaukeng* ini bisa dalam bentuk apapun, dan biasanya memiliki ciri-ciri yang aneh. Dipercaya bahwa ketika beberapa anggota dari komunitas menemukan benda keramat tersebut, mereka kemudian memberikan pelayanan yang terbaik dalam rangka untuk merawatnya, lalu orang yang menemukan benda tersebut dijadikan sebagai pemimpin dari komunitas. (sumber : Leonard Y. Andaya, *Warisan Arung Palakka : Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17*).

⁸ Leonard Y. Andaya, *op.cit.*, hlm. 27.

melakukan demikian telah dianggap “ mati “ secara harga dirinya sebagai manusia⁹. Maka tidak heran jika beberapa penguasa terdahulu dilengserkan sebagai konsekuensi dari tindakannya tersebut, semisal Karaeng Tunipasulu’ dari Kerajaan Gowa, dimana ia digulingkan dari tahtanya karena ia melanggar perjanjian terkait konsep “ *satu negara dengan dua raja* “¹⁰ diantara Kerajaan Gowa dan Tallo. Tindakannya tersebut dapat dilihat dari bagaimana ia juga menuntut tahta Kerajaan Tallo dari ibunya I Sambo. Setelah Tunipasulu’ menduduki kedua takhta kerajaan, lalu ia pun menjalankan pemerintahan dengan sewenang-wenang¹¹.

Berangkat dari pengertian serta beberapa contoh kasus diatas, maka arti secara keseluruhan *siri’ na pacce’* adalah suatu ikatan solidaritas yang terbentuk diantara para individu dalam sebuah komunitas dalam rangka menjunjung tinggi serta mempertahankan nilai-nilai adat/tradisi.

Elit secara penggunaan kata dipahami sebagai golongan orang atau kelompok tertentu yang menempati tingkat tertinggi dari strata sosial, dimana golongan dari orang-orang elit tersebut diposisikan sebagai orang-orang yang terpandang dalam masyarakat. Mereka merupakan pemilik kekuasaan, kekayaan,

⁹ Andi Zainal Abidin Farid, *Wajo’ Pada Abad XV-XVI : Suatu Penggalan Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan dari Lontara’* (Jakarta, Universitas Indonesia, 1979), hlm. 494.

¹⁰ Maksud dari konsep ini adalah bahwa Gowa dan Tallo merupakan dua kerajaan yang saling bersatu, sebagaimana yang ditegaskan oleh Karaeng Matoaya pada masa Tallo dibawah kepemimpinan Tumenangnga ri Makkoayang (1547-1557) : “ *Pada masa ini dikatakan bahwa hanya ada satu negara dan dua raja* “. (sumber : Anthony Reid, *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara : Suatu Pemetaan*).

¹¹ Anthony Reid, *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara : Suatu Pemetaan* (Jakarta, LP3ES, 2005), hlm. 153-154.

serta memiliki taraf hidup yang lebih ketimbang orang-orang pada umumnya di masyarakat¹².

Menurut analisis Mattulada golongan elit dalam struktur sosial masyarakat Bugis-Makassar secara garis besar dibagi atas dua, yaitu elit feodal tradisional dan elit aristokrat. Golongan elit feodal tradisional merupakan golongan yang berisi raja dan para keluarganya (bangsawan) yang masing-masing memegang jabatan politik, baik ditingkat pusat pemerintahan maupun di bagian daerah-daerah kekuasaan yang merupakan kerajaan bawahan. Adapun golongan elit aristokrat berisi orang-orang yang secara silsilah bukan merupakan darah murni (keturunan Tomanurung), namun memiliki posisi dan kedudukan terpandang di kerajaan¹³. Golongan elit tradisional biasanya dapat ditandai dengan namanya, semisal :

1. La Rumpang Megga **Dulung Ajeng Ale' Datu Lamuru Datu Tanete**
2. Retna Kencana Colliq PujiE **Arung Pancana Toa**

Melihat kedua contoh diatas, poin satu menandakan bahwa ia adalah seorang raja (yang merupakan golongan elit bangsawan tertinggi), sedangkan poin dua menandakan bahwa ia merupakan golongan elit bangsawan penguasa suatu wilayah/daerah kerajaan.

Pada mulanya, hanya ada dua lapisan yang menjadi pondasi dalam struktur sosial masyarakat di kerajaan-kerajaan Bugis, yakni *anakarung* (bangsawan) sebagai golongan para penguasa dan *to samma* yang posisinya sebagai rakyat yang

¹² Mattulada, *Bugis-Makassar : Manusia dan Kebudayaanannya* (Jakarta, Universitas Indonesia, 1974), hlm. 65.

¹³ *Ibid*, hlm. 69.

dikuasai. Tetapi dengan adanya prinsip *assituruseng* atau kesepakatan bersama dalam menanggapi hal-hal yang sifatnya baru, diketahui bahwa ternyata bukan hanya golongan *anakarung* saja yang dapat dipredikatkan sebagai penguasa, namun bisa juga dari golongan rakyat biasa (*to samma*) yang mempunyai prestasi sosial diantara masyarakat. Diantara beberapa golongan tersebut adalah :

1. *To panrita*, yaitu mereka yang berasal baik dari *anakarung* maupun *to samma* yang menjadi cendekiawan, ulama, *kadi*, atau orang-orang yang telah bekerja demi kemaslahatan masyarakat
2. *To sugi*, para orang kaya baik dari golongan *anakarung* maupun *to samma* yang berkat kegigihannya dalam berusaha berhasil menjadi seorang usahawan yang terpandang, sehingga dari hal tersebut mereka berperan dalam mensejahterakan masyarakat
3. *To warani*, golongan para pemberani yang berperan untuk tampil membela kerajaan dari ancaman musuh, seperti panglima perang
4. *To sulesana*, yaitu para pakar di bidang tertentu yang memiliki peran untuk memecahkan persoalan serta memberikan kontribusi pembaharuan di masyarakat¹⁴.

Empat posisi tersebut digolongkan sebagai posisi *elit aristokrat* dalam masyarakat Bugis, dan boleh dikatakan kedudukannya setara dengan golongan bangsawan. Namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa bangsawan merupakan

¹⁴ Mattulada, *Latoa : Antropologi Politik Orang Bugis*, (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2015), hlm. 40.

predikat khusus yang diberikan pada keturunan raja. Sehingga meskipun secara kedudukan setara, tetap tidak diperkenankan untuk memakai hal-hal yang merupakan “ atribut kebangsawanan “ (seperti penggunaan lencana, pusaka, ataupun gelar).

Bangsawan dalam struktur masyarakat Bugis secara garis besar diklasifikasikan dalam empat golongan. *Pertama*, *anakarung matase* yang merupakan bangsawan dengan predikat “ penuh “, terdiri atas raja dan *anakarung mattola* (putra/putri mahkota). *Kedua*, *anakarung ri bolang* yang disebut juga dengan istilah bangsawan warga istana, dimana terdiri atas para kerabat raja. *Ketiga*, *ana' rajeng* atau yang disebut bangsawan separuh. *Keempat*, *ana' cera'* yang merupakan bangsawan berdarah campuran¹⁵.

Berdasarkan penggolongan kategori bangsawan tersebut, ada dua aturan yang sangat ditekankan dalam konteks struktur sosial kerajaan. *Pertama*, bahwa seorang laki-laki dari golongan bangsawan penuh dapat menikah dengan seorang perempuan dari golongan yang sama ataupun golongan diluar bangsawan. *Kedua*, yang punya hak untuk menjadi raja hanyalah dari golongan bangsawan penuh, dikarenakan dianggap memiliki darah *Tomanurung* yang dikenal dalam istilah Bugis *to maddara takku*¹⁶.

Secara garis besar, hanya dua golongan yang merupakan kategori *primer* dalam struktur lapisan masyarakat Sulawesi Selatan, yakni *anakarung* dan *to*

¹⁵ *Ibid.* hlm. 31.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 32.

maradeka. Adapun golongan *ata* sendiri merupakan golongan yang masuk dalam kategori sekunder. Golongan bangsawan merupakan titik sentral dalam sirkulasi kekuasaan di kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar. Oleh sebab itulah, ketika terjadi pendudukan oleh Belanda, golongan bangsawan inilah yang kemudian dianggap paling berbahaya. Sebagai langkah taktisnya, para pejabat-pejabat di kerajaan dirombak total, sehingga yang mengisi posisi adalah mereka yang dianggap berjasa untuk pemerintah kolonial. Hal demikian tidak lain untuk memudahkan *controlling* terhadap raja dan rakyatnya.

Seluruh penggolongan elit, bangsawan, hingga bagaimana pelapisan masyarakat dalam kebudayaan Bugis-Makassar didasarkan atas latar-belakang kehadiran *Tomanurung* yang menjadi cikal-bakal berdirinya dari kebanyakan kerajaan Bugis-Makassar, atau bisa juga disebut dengan dimulainya periode *lontara*'. Pada periode ini rakyat telah memiliki peran dalam proses "penyelenggaraan negara" selain daripada penguasa, meninggalkan periode sebelumnya *La Galigo*, yang dimana periode ini terlalu didominasi oleh kesaktian serta ketetapan langit, sedangkan manusia tidak memiliki peran sama sekali selain daripada tunduk mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh langit¹⁷.

Berdasarkan judul penelitian ini, penulis berupaya untuk menganalisis bagaimana konflik persaingan yang terjadi dalam lingkup elit bangsawan Kerajaan Tanete. Akan tetapi perlu untuk diketahui sekalipun istilah elit dan bangsawan

¹⁷ Mattulada, *op.cit.*, hlm. 36-37.

sering disandingkan, namun arti lebih dalam dari kedua istilah tersebut berbeda, khususnya jika kita melihat struktur sosial dalam masyarakat Bugis.

Kerajaan Tanete beberapa kali dilanda persoalan konflik internal. Menurut analisis Coser, yang dimaksud dengan konflik internal adalah sebuah konflik yang terjadi antar individu dalam satu ruang lingkup kelompok. Konflik dapat dipicu oleh ketegangan sebagai buah dari tiap individu tersebut yang ingin meningkatkan status serta kedudukannya¹⁸.

Kondisi politik di Sulawesi Selatan pada abad ke-19 penuh dengan pergolakan, salah satu faktornya adalah ketika Inggris secara resmi menyerahkan kembali wilayah kekuasaannya, Belanda kemudian mencoba untuk mengupayakan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan dalam rangka menegakkan supremasinya kembali di Sulawesi Selatan. Hal ini kemudian mendapat penolakan keras dari kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, termasuk diantaranya adalah Kerajaan Tanete.

Akibat dari penolakan yang dilakukan oleh Kerajaan Tanete, maka timbullah serangkaian konflik internal yang kemudian menjadi tema utama penelitian ini. Konflik internal ini dipetakan dalam tiga babak yang diwakili oleh tokohnya masing-masing, yaitu :

¹⁸ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi, Klasik dan Modern* (terjemahan), Robert M.Z. Lawang (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama : 1990), hlm. 196-200.

1. Konflik antara La Patau Datu Tanete Matinroe ri Salomoni dan La Rumpang Megga Dulung Ajeng Ale' Datu Lamuru Datu Tanete Matinroe ri Mutiara, yang merupakan konflik antara dua dinasti La Tenrisessuq dan La Maddusila
2. Konflik antara Retna Kencana Colliq Puji'e Arung Pancana Toa dan Siti Aisyah We Tenriolle Datu Tanete yang merupakan konflik antara ibu dan anak
3. Konflik antara Siti Aisyah We Tenriolle dan La Sangaji Unru Datu Bakka yang merupakan konflik antara istri dan suami

Babak pertama dari konflik internal berhasil membawa La Rumpang Megga naik takhta sebagai raja Tanete berkat bantuan yang diberikan oleh Belanda saat perseteruannya dengan La Patau, sehingga babak ini menjadi titik dimana intervensi Belanda mulai kelihatan di Kerajaan Tanete. Babak kedua sebagai kelanjutan dari konflik sebelumnya, Colliq Puji'e berdasarkan sikap politiknya yang menentang Belanda kemudian memutuskan untuk menentang anaknya sendiri We Tenriolle yang mengambil jalan untuk bekerjasama dengan Belanda, akan tetapi berkat bantuan Belanda We Tenriolle dapat meredam penentangan yang dilakukan oleh ibunya tersebut. Adapun babak ketiga merupakan fase puncak dari konflik internal ini, dimana sekali lagi berkat bantuan oleh Belanda, We Tenriolle dapat meredam gerakan makar yang dilakukan oleh suaminya sendiri La Sangaji Unru Datu Bakka.

Batasan Masalah

Dalam sebuah penelitian, perlu adanya pembatasan terkait permasalahan yang akan diteliti. Hal ini dengan tujuan selain untuk mempermudah, juga agar pembahasan penelitian dapat dijabarkan secara spesifik sehingga tidak melebar kemana-mana. Ada dua poin utama yang dibatasi dalam penelitian, yaitu batasan waktu (temporal) serta batasan tempat (spasial).

a) Batasan temporal

Penelitian ini mengambil rentang waktu 1814 hingga 1910. Tahun 1814 dijadikan sebagai tonggak *Perjanjian Bungaya* yang diperbaharui, yang dimana hal ini kemudian dimanfaatkan oleh La Tenrisessuq untuk merebut kembali Pancana dari kekuasaan keturunan La Maddusila. Sedangkan tahun 1910 dijadikan sebagai tanda akhir dari masa kekuasaan We Tenriolle sebagai Raja Tanete ke-20. Dalam penelitian ini, We Tenriolle dijadikan sebagai titik penekanan dari serangkaian konflik diantara elit bangsawan Tanete pada masa itu, dimana ia sendiri merupakan keturunan dari La Tenrisessuq sehingga hal tersebut menggambarkan bagaimana perebutan kekuasaan oleh keturunan La Tenrisessuq terhadap keturunan La Maddusila.

b) Batasan spasial

Untuk tempat sendiri penelitian ini membatasi pada wilayah Kerajaan Tanete, yang saat ini secara administratif berada pada wilayah Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka menghadirkan sebuah pertanyaan penelitian : Mengapa terjadi konflik persaingan di antara para elit bangsawan di Kerajaan Tanete, untuk menjawabnya maka penulis berupaya untuk melacaknya melalui tiga pertanyaan dasar:

- a. Siapa tokoh-tokoh elit bangsawan Kerajaan Tanete yang saling berkonflik tersebut ?
- b. Bagaimana kemudian konflik tersebut mempengaruhi perubahan kondisi sosial politik di Kerajaan Tanete ?
- c. Bagaimana dampak dari konflik elit bangsawan pada periode tersebut, baik terhadap kondisi sosial maupun politik/pemerintahan Kerajaan Tanete ?

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk menganalisis dampak sosial serta politik dari konflik elit bangsawan Kerajaan Tanete.
- b. Untuk melacak bagaimana peta politik kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, utamanya pada abad ke-18 hingga abad ke-19

2. Manfaat

- a. Memberi gambaran mengenai kondisi sosial serta dinamika masyarakat Kerajaan Tanete 1814-1910.

- b. Memahami dampak sosial, ekonomi, serta politik dari konflik elit bangsawan Kerajaan Tanete
- c. Hasil dari penelitian ini dapat memperkaya wawasan kita akan dinamika sosial kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, khususnya Kerajaan Tanete.

1.4. Tinjauan Pustaka

a. Penelitian yang relevan

1) Buku *Retna Kencana Colliq Pujie Arung Pancana Toa 1812-1876* :

Intelektual Penggerak Zaman karya Nurhayati Rahman

Sebagaimana buku dalam kategori biografi, tentu muatan-muatan narasinya lebih diprioritaskan pada perjalanan hidup sang tokoh. Namun, *Intelektual Penggerak Zaman* milik Prof. Nurhayati Rahman ini dikategorikan sebagai buku “ biografi interpretatif “, yang dimana biografi dari Colliq Pujie ditopang pula oleh penjelasan mengenai bagaimana sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan di Bugis, keunikan budaya khas Bugis-Makassar, kehidupan sosial masyarakatnya, dan tak luput pula bagaimana imperialisme yang dilancarkan oleh Belanda serta dampaknya secara politis. Buku ini dirujuk oleh penulis, dikarenakan tidak hanya berfokus pada riwayat hidup sang tokoh, melainkan juga menjelaskan tentang situasi sosial pada masa rentang waktu kehidupannya. Gambaran umum tentang situasi politik Sulawesi Selatan pada abad ke-19 dapat dilacak melalui buku ini, khususnya mengenai dinamika pergolakan internal di Kerajaan Tanete.

2) Buku *Gerakan Sosial Di Tanah Bugis : Raja Tanete Lapatau Menentang Belanda* karya A. Rasyid Asba

Karya ini memuat riwayat perlawanan yang dilakukan oleh Lapatau (Raja Tanete ke-17 sekaligus 19) terhadap penjajahan Belanda. Penjabaran mengenai gerakan perlawanan tersebut disertai pula dengan penjelasan mengenai situasi serta kondisi politik Kerajaan Tanete, baik pada masa sebelum maupun pada masa gerakan perlawanan, hingga masa setelahnya. Karya ini juga dirujuk oleh penulis untuk melacak lebih jauh bagaimana pergolakan politik yang terjadi di Kerajaan Tanete, serta bagaimana persentuhannya dengan konflik internal yang terjadi di antara para elit bangsawan.

Selain dari penjabaran mengenai perlawanan La Patau Datu Tanete Matinroe ri Salomoni, buku ini juga menyinggung secara detail terkait bagaimana gambaran kondisi geografis dari Tanete, gambaran umum penduduk, sampai pada bagaimana kondisi politik Sulawesi Selatan secara umum sejak berakhirnya Perang Makassar menjelang akhir abad ke-17 sampai kedatangan Belanda untuk kedua kalinya pada awal abad ke-19.

Lewat buku ini pula, dijelaskan secara interpretatif apa yang menjadi landasan mengapa La Patau selaku raja Tanete saat itu dengan gigih tetap menolak kehadiran kembali Belanda di Sulawesi Selatan. Padahal Belanda pada saat itu sedang dalam kondisinya yang prima, sehingga ketika sikap politik yang diambil adalah melawan maka sama saja dengan mengundang kehancuran.

3) Buku *Sejarah Kerajaan Tanete 1574-1960* karya Basrah Gising

Karya ini merupakan sumber sekunder yang dijadikan sebagai acuan utama oleh penulis. Adapun secara garis besar, muatan utama dari buku ini adalah penjabaran tentang bagaimana sejarah pasang-surut dinamika Kerajaan Tanete dalam rentang periode yang diteliti oleh penulis buku ini.

Lewat buku ini penulis melacak secara genealogis serta kronologis bagaimana dinamika sejarah perkembangan Kerajaan Tanete melalui ringkasan singkat dari periode tiap-tiap raja yang pernah memerintah Tanete, mulai dari Datu Golla'e sebagai raja pertama hingga raja ke-XX We Tenri Olle yang merupakan fokus utama dari tema penelitian ini.

Berdasarkan pembacaan yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa poin yang menjadi kunci disetiap periode raja-raja yang pernah memerintah Tanete, diantaranya adalah

1. Periode raja ke-I Datu Golla'e merupakan masa awal perintisan Tanete yang semula bernama Kerajaan Agang Nionjo'.
2. Periode raja ke-III Matinroe ri Boko Kajurunna adalah masa dimana Kerajaan Agang Nionjo' mulai melakukan perluasan wilayah kekuasaannya.
3. Periode raja ke-IV Daeng Ngaseng adalah periode yang dimana untuk pertama kalinya dikukuhkan hubungan persaudaraan antara Kerajaan Gowa dan Kerajaan Agang Nionjo', setelah kemenangan mereka atas peperangan dengan Kerajaan Sawitto.

4. Periode raja ke-VIII Tomaburu' Limanna adalah periode dimana digantinya nama kerajaan dari Agang Nionjo' menjadi Tanete, atas dasar hubungan persahabatan yang dibangun oleh Datu Tanete dengan Opu Tanete Selayar.
5. Periode raja ke-X Matinroe ri Bulianna merupakan periode yang bertepatan dengan masa berlangsungnya Perang antara Gowa dengan Bone yang bersekutu dengan VOC. Kerajaan Tanete pada masa ini berpihak pada Bone, sehingga dengan demikian membuat hubungan persaudaraannya dengan Gowa menjadi renggang.
6. Periode raja ke-XV We Tenrileleang adalah periode dimana Kerajaan Tanete semakin memantapkan sikap politiknya dalam menjalin kerjasama dengan Belanda
7. Periode raja ke-XVII sekaligus ke-XIX La Patau merupakan periode yang dijadikan pintu masuk oleh peneliti, dalam melihat bagaimana konflik persaingan yang terjadi diantara para elit bangsawan, utamanya jika dikaitkan dengan kedatangan kembali Belanda pasca berakhirnya masa kekuasaan Inggris.
8. Periode raja ke-XX We Tenri Olle merupakan periode yang dipetakan oleh penulis sebagai puncak dari rentetan konflik persaingan yang terjadi diantara elit bangsawan Kerajaan Tanete.

b. Landasan konseptual

Sejarah sosial merupakan kajian sejarah tentang masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat yang mencoba untuk melihat bukti-bukti sejarah dari sudut pandang sosial untuk mengembangkan sebuah tren sosial. Kehidupan sosial masyarakat tidak terlepas dari etnis-etnis yang ada. Etnis (ethnic) berlaku sebagai ciri budaya, etnis merujuk pada orang yang mengidentifikasi diri satu sama lain atas dasar keturunan dan warisan budaya bersama.

Judul penelitian yang akan diangkat oleh penulis didasarkan pada tema sejarah sosial, dengan mengambil rentang waktu pada periode ketika kolonialisme Belanda sedang gencar-gencarnya menggempur kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Adapun secara spesifik, penulis ingin menyelami bagaimana struktur sosial masyarakat di Kerajaan Tanete dipengaruhi oleh konflik internal para elit bangsawan kerajaan.

Sebagaimana dalam pandangan sosiolog Lewis Coser, bahwa konflik adalah suatu proses instrumental yang dapat membentuk struktur sosial, serta memeliharanya. Bahwa konflik antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya dapat memperkuat identitas dari kelompok tersebut.

Mengacu pada pandangan Coser diatas, kita dapat mengambil hipotesis bahwa tidak selamanya yang dikatakan konflik itu merupakan sesuatu yang bersifat destruktif. Adakalanya dalam situasi dan kondisi tertentu, seperti dalam rangka penguatan identitas serta pertahanan suatu kelompok, konflik dibutuhkan untuk berperan.

Seluruh fungsi positif dari konflik itu keuntungan dari situasi konflik yang memperkuat struktur, dapat dilihat ilustrasi suatu kelompok yang sedang mengalami konflik dengan *out group*. Di dunia internasional kita dapat melihat bagaimana konflik terjadi apakah dalam bentuk tindakan militer, meja perundingan, mampu menetapkan batas-batas geografi nasional¹⁹.

Berdasarkan latar-belakang penelitian ini, maka dapat diidentifikasi bahwa memang faktanya terjadi perpecahan di tubuh internal Kerajaan Tanete, dimana konflik tersebut didasarkan atas perebutan kekuasaan. Konflik semakin meruncing manakala kedua kubu elit bangsawan terpecah antara yang sangat menentang Belanda dan yang memilih bekerja-sama dengannya.

Kendati demikian kedua-belah pihak memiliki visi yang sama, yakni bagaimana agar Tanete tetap aman dari “gangguan” sebagai efek dari bercokolnya Belanda di Sulawesi Selatan pada masa itu, serta untuk membangun Tanete menjadi lebih baik kedepannya.

1.6. Metode Penelitian

Sebagai langkah awal penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data terlebih dahulu, baik yang sifatnya primer maupun sekunder. Adapun penulis sendiri menjadikan beberapa arsip sebagai sumber primer, salah satunya adalah buku *Zijn Leven En Arbeid In Dienst van Het Nederlandsche Bijbelgenootschapp* karya Dr. Benjamin Frederik Matthes. Sedangkan untuk sumber sekunder penulis menjadikan buku : *Retna Kencana Colliq Pujie Arung Pancana Toa Intelektual*

¹⁹ Drs. Selvie M. Tumengkol, M.Si., *Teori Sosiologi Suatu Perspektif Tentang Teori Konflik Dalam Masyarakat Industri*, (Manado, Universitas Sam Ratulangi, 2012)., hlm. 10.

Penggerak Zaman karya Nurhayati Rahman, *Gerakan Sosial di Tanah Bugis Raja Tanete Lapatau Menentang Belanda* karya A. Rasyid Asba, dan *Manusia Bugis* karya Christian Pelras sebagai rujukan utama

Setelah sumber-sumber data dikumpulkan, maka proses pemilahan terkait keaslian sumber dilakukan oleh penulis melalui kritik ekstern; dan keabsahan tentang kesahihan sumber yang ditelusuri melalui kritik intern. Dalam penelitian ini penulis telah melakukan kritik pada sumber primer yang ditemukan, dan meski sumber primer yang didapat merupakan salinan, dapat dinyatakan bahwa dokumen yang di dapat adalah asli dari objek yang diteliti.

Setelah pemilihan dan pengujian terhadap sumber telah dilakukan oleh penulis, maka data-data itu kemudian akan disusun secara sistematis, namun dalam hal ini penulis tidak lantas melangkah pada proses penulisan, karena data yang telah tersusun nanti masih akan diuji kembali secara analisis pemahaman melalui metode interpretasi.

Sebagai tahap akhir dalam penelitian sejarah, penulis akan melakukan teknik penulisan historiografi sesuai dengan metode yang ada, dengan berlandaskan pada metodologi penulisan sejarah, meliputi cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.²⁰

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

²⁰ *Ibid.* hlm 80.

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penelitian. Poin penting dalam bab ini adalah gambaran umum tentang bagaimana situasi konflik internal di Kerajaan Tanete, yang di hari kemudian memberi dampak pada kondisi sosial, politik, serta ekonomi masyarakat Tanete.

BAB II : Wilayah dan Struktur Sosial Masyarakat Kerajaan Tanete

Bagian ini akan menguraikan bagaimana gambaran mengenai wilayah serta struktur sosial di Kerajaan Tanete, berdasarkan periode penelitian yang diambil oleh penulis.

BAB III : Profil Singkat Para Bangsawan Kerajaan Tanete Yang Terlibat Dalam Konflik Persaingan 1814-1910

Sehubungan dengan tema penelitian, maka pada bagian ini akan dipaparkan profil singkat para tokoh yang terlibat dalam konflik persaingan.

BAB IV : Jalannya Konflik Persaingan

Bab ini merupakan inti dari penelitian ini, dimana rentetan konflik perseteruan para elit bangsawan mencapai klimaksnya dengan naiknya We Tenriolle sebagai Raja Tanete, menggantikan raja sebelumnya La Rumpang. Disini akan dipaparkan bagaimana situasi konflik sebelum naiknya We Tenriolle hingga akhir periode kekuasaannya.

BAB V : Kesimpulan

Bab ini merupakan rangkaian dari bab pertama hingga bab keempat, yang akan bermuara pada penjelasan terkait konflik persaingan di antara para elit

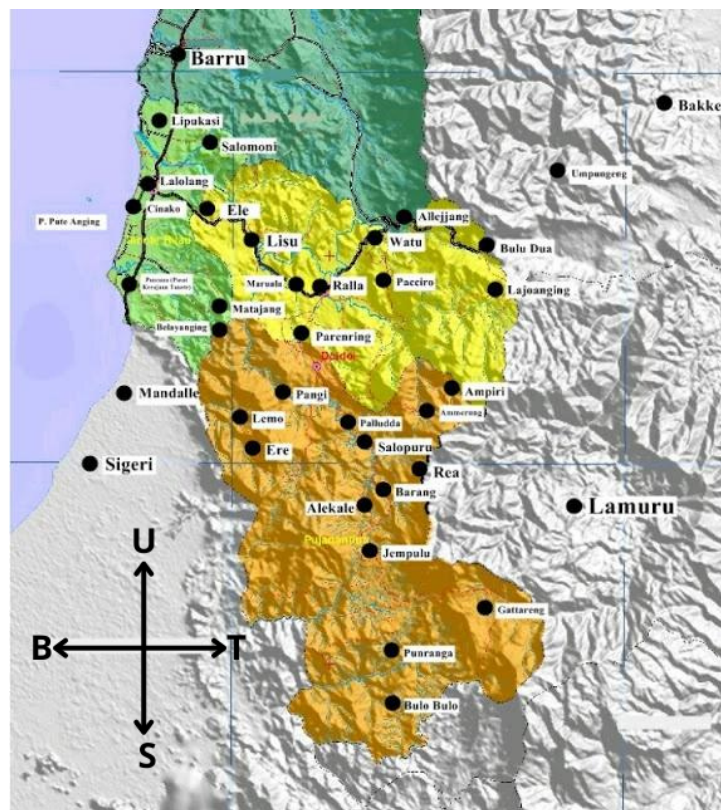
bangsawan di Tanete pada tahun 1814-1910, serta gerakan sosial dan politik yang melatarbelakanginya.

BAB II

Wilayah Dan Struktur Sosial Masyarakat Kerajaan Tanete

2.1 Kondisi Wilayah Geografis

Peta wilayah Kerajaan Tanete



Peta 1.0.

(Diakses di sultansinindonesieblog.wordpress.com pada 1/7/2024)

Kerajaan Tanete memiliki luas wilayah 218,94 m², dan berbatasan dengan Kerajaan Barra serta Mario ri Wawo disebelah utara, Lamuru di sebelah timur, Balocci dan Mandalle disebelah selatan, serta Selat Makassar disebelah barat.

Memiliki 5 distrik serta 4 wilayah bawahan, yaitu : Distrik Lompo ri Lau, Lompo ri Tangnga, Lompo ri Aja, Patappa, dan Gattarang. Adapun untuk wilayah sendiri meliputi : Lipukasi, Lalolang, Pancana, dan Cinakko¹.

Kerajaan Tanete memiliki bentangan alam yang didominasi oleh perbukitan serta memiliki banyak gunung. Hanya wilayah bagian barat saja yang memiliki daerah pantai seluas 14m² dan dikelilingi oleh hamparan persawahan yang begitu luas².

Pegunungan di Kerajaan Tanete membentang mulai dari utara hingga selatan, dan terbagi atas tiga bagian. Pegunungan paling utara memiliki titik tengah di Gunung Buludua (tinggi 830 ello) hingga ke Gunung Laposo (tinggi 930 ello). Pegunungan ini terbentang menghadap ke barat laut antara wilayah Barru dan Mario hingga gunung Alipang. Dari titik gunung Laposo, lereng pegunungan ini terbentang menghadap laut antara Barru dan Tanete. Lereng ini memiliki tiga gunung yang memiliki predikat sebagai puncak tertinggi, yakni gunung Bonto Suwa (tinggi 480 ello), Jarome (tinggi 300 ello), dan Jamai (tinggi 330 ello). Lalu di lembah yang terbentuk oleh gunung Bulu Duwa dan Ungae, mengalir sungai Panrokobatuwa ke arah timur serta sungai Uwae Ampalla yang mengalir ke arah barat. Lereng pegunungan ini memiliki kondisi yang curam³.

¹ Empat wilayah utama dari Tanete itu dikenal dengan istilah *palili*, atau dalam arti Bahasa Indonesianya adalah wilayah/kerajaan bawahan. Masing-masing dari *palili* diperintah oleh seorang *Arung*. (sumber : A. Rasyid Asba, *Gerakan Sosial Di Tanah Bugis : Raja Tanete Lapatau Menentang Belanda*)

² J.A. Bakkers, *Tanette et Barroe* (Batavia, Tijdschr, 1863), hlm. 293

³ *Ibid.* hlm. 294.

Wilayah pegunungan kedua terletak diantara sungai Salomenrong dan Ralla, yang dibentuk oleh lereng dari tiga gunung yakni Ungae (tinggi 950 ello), Paciro (tinggi 900 ello), dan Boto Pakka (tinggi 860 ello). Lereng ketiga gunung ini memiliki bentuk mendekati tegak lurus dan dipadukan oleh dua sungai yang mengarah ke sebuah lembah, sehingga membentuk daerah persawahan Lompo Riaja. Bentangan wilayah pegunungan ini ditutup oleh hutan belukar dan alang-alang serta kebun jagung dan sirih yang tumbuh di daerah Panciro dan Mentong⁴.

Wilayah pegunungan ketiga sekaligus terakhir berada diantara sungai Ralla dan Gantarang. Terdiri atas lima gunung utama yakni gunung Tile (tinggi 980 ello), Barang (tinggi 880 ello), Maruku (tinggi 860 ello), Mareno (tinggi 880 ello), dan Topolowara (tinggi 880 ello). Gunung Tile yang terletak diantara sungai Ralla dan Paluda terdiri atas sejumlah gunung dengan lerenga yang begitu terjal, penurunan curam, serta sebagian besar tertutupi oleh alang-alang. Dari gunung inilah berbagai sungai beserta anak sungai mendapatkan sumber airnya. Gunung Barang terletak diantara sungai Paluda dan gunung Maruku, dengan kondisi yang ditutupi oleh karang dan hutan serta memiliki kemiringan yang sangat terjal menghadap ke sungai Lipukasi. Gunung Maruku terletak diantara kolam yang berada di wilayah gunung ini dan sungai Punranga, dengan kondisi yang ditutupi oleh karang dan begitu terjal, serta ditutupi pula oleh kebun jagung disana-sini. Gunung Mareno terletak diantara sungai Kadereng dan Lipukasi, lereng dari gunung ini terbagi dua oleh karena sungai Tanete, dimana bagian timur dikenal dengan nama lereng Silojo dengan puncak Tanetenya yang mencapai ketinggian 732 ello dengan kemiringan

⁴ *Ibid.*

70-80° menghadap arah sungai Lipukasi. Sedangkan untuk bagian barat gunung Mareno terbentuk batas antara Tanete dan Segeri, yang terdiri atas pegunungan Lakoayang, Mapakkae, dan Serongang. Wilayah gunung Mareno berlanjut kearah selatan yang terdiri atas gunung Dengeng-dengeng yang terletak diantara sungai Kadieng dan Pariemba, dimana cabang-cabang dari dua sungai tersebut membentuk pula batas antara Tanete dan Segeri. Terakhir untuk gunung Topolowara, terletak diantara sungai Punranga dan Gattarang. Di bagian timurnya terdapat lereng yang dikenal dengan nama Sarenge, yang membentuk batas antara sungai Cinrana (Walanae) dan Salomati, di wilayah tersebutlah terletak kawasan persawahan Gattarang. Untuk bagian selatan gunung ini terdapat lereng Tanjung yang menurun menghadap ke arah Segeri⁵.

Sebenarnya di luar tiga wilayah gunung utama di atas terdapat pula gunung Tondongkarambu yang terletak di antara Gattarang dan Lamuru. Gunung ini memiliki kondisi curam. Di bagian selatan gunung Tondongkarambu terdapat sumber air yang mengalir ke sungai Balangbaru.

2.2 Gambaran Penduduk

Penduduk asli dari Tanete merupakan suku Bugis yang dimana karakteristik adat, kebiasaan, pakaian, cara bermukim, serta bahasanya mirip dengan kerajaan-kerajaan Bugis lain pada umumnya. Dalam catatan J.A Bakkers, jumlah penduduk Tanete di tahun 1861 mencapai 13.362 jiwa. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam, namun hanya sebagian kecil yang betul-betul menjalankan syariatnya secara

⁵ *Ibid.* hlm. 295.

penuh, karena di sebagian besar kampung utamanya di pegunungan, Islam masih dipandang sebatas khitanan dan tidak memakan daging babi⁶.

Agama asli penduduk awal masih cukup mendominasi dalam kehidupan rakyat Tanete, contohnya jika semisal hukum adat Bugis bertentangan dengan hukum *fiqih* dalam Islam, maka yang diambil sebagai patokan adalah hukum adat⁷.

Di Kerajaan Tanete terdapat pula beberapa penduduk yang merupakan orang Arab dan orang Cina. Untuk orang Arab sendiri kebanyakan telah berbaur dengan penduduk pribumi, serta mayoritas menggarap lahan pertanian, mereka diberikan izin untuk tinggal di wilayah Tanete. Adapun untuk orang-orang Cina sendiri mereka diberikan izin untuk tinggal di ibukota *Onderafdeeling* Barru.

2.3 Kedudukan Bangsawan Dalam Posisi Struktur Sosial

Secara kedudukannya, Kerajaan Tanete merupakan *vassal* dari Kerajaan Bone, yang dimana kepala pemerintahannya adalah *Datu*. Datu dipilih oleh orang-orang yang kemudian disebut *Hadat*⁸, begitupun juga dengan kepala-kepala daerah. Hingga kepala kampung (desa), sekalipun ia dipilih oleh rakyatnya, namun tetap Hadatlah yang secara politis berwenang untuk mengangkat serta memberhentikannya.

⁶ A. Rasyid Asba, *Gerakan Sosial Di Tanah Bugis : Raja Tanete Lapatau Menentang Belanda* (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2010), hlm. 20

⁷ A. Rasyid Asba, *loc.cit.*

⁸ Hadat dapat disebut sebagai semacam Dewan Adat, yang bertugas untuk mengangkat seorang Datu, mengangkat atau memberhentikan kepala daerah. Hadat secara politis mempunyai posisi yang sentral di Kerajaan Tanete, sebagaimana dewan adat-dewan adat diberbagai kerajaan (khususnya Sulawesi Selatan) lainnya.

Ketika menghadapi situasi persoalan penting, bukan hanya para *Arung palili* saja yang dimintai saran pertimbangan oleh Datu, melainkan para *ulama* juga. Adapun persoalan-persoalan internal palili secara wewenang diselesaikan oleh Arung dan Hadat.

Secara aturan adat dan politik, penduduk Kerajaan Tanete tidak dikenakan wajib pajak. Karena hal tersebut sudah menjadi semacam “ kesadaran “ yang tertanam di benak masyarakat, semisal tiap pasca-panen masyarakat biasanya memberikan sebagian dari hasil panen tersebut⁹, sebagai tanda penghormatan pada Datu secara umum dan kepala daerah mereka masing-masing secara khusus.

Menurut analisis Pelras, dalam kerangka sosial masyarakat Bugis dikenal istilah *Arung* dan *anakarung*. Gelar *Arung* diperuntukkan untuk golongan tertentu dari penguasa, semisal raja. Sedangkan *anakarung* di predikatkan khusus untuk kalangan bangsawan. Dalam sejarahnya, mereka yang menempati kedudukan tertinggi di Kerajaan Tanete adalah mereka yang secara memiliki garis keturunan dari *Tomanurung*. Oleh karenanya, mereka memiliki beberapa hak istimewa seperti mengatur kehidupan masyarakat, melakukan pembagian tanah, dan sebagainya. Selain dua golongan “ atas “ tersebut, terdapat juga mereka yang digolongkan sebagai “ orang biasa “ atau yang disebut *To maradeka*, serta golongan yang menempati kedudukan terendah yang disebut sebagai *Ata* (budak).

Terdapat tiga tingkatan golongan dalam sistem kehidupan masyarakat Bugis-Makassar, sebelum kolonial datang untuk mengintervensi wilayah Sulawesi

⁹ A.Rasyid Asba, *op.cit*, hlm. 48.

Selatan. Pertama adalah *anakarung*, yaitu orang-orang dari kalangan bangsawan yang merupakan kerabat dari raja. Kedua mereka yang disebut *To maradeka*, yaitu golongan orang biasa yang dimana mereka merupakan golongan mayoritas dari rakyat. Terakhir adalah *Ata* yang merupakan golongan hamba sahaya, mereka yang termasuk dalam golongan ini adalah para tawanan perang, yang tidak mampu melunasi hutangnya, serta mereka yang melanggar pantangan adat¹⁰.

Melihat pada gambaran tentang struktur sosial diatas, terdapat suatu hal yang menjadi pengikat secara keseluruhan dalam struktur sosial tersebut, yakni hubungan “ patron-klien “. Dimana dalam jalinan hubungan tersebut aspek kemasyarakatan menjadi pondasi dasar utamanya. Sistem patron-klien ini menempatkan posisi bangsawan sebagai titik temu diantara penguasa dan rakyat, dimana ia berperan sebagai patron, sedangkan rakyat sebagai klien yang status dan kedudukannya dilindungi serta patuh kepada penguasa. Keterkaitan antara berbagai komponen inilah yang kemudian menjadi penentu berjalan atau tidaknya mobilitas sosial di kerajaan.

Sistem patron klien adalah kerangka sosial yang telah berlangsung selama periode panjang dalam rangka memfasilitasi mobilitas sosial, kompetisi antara individu dengan status sejajar, kerjasama antar-strata sosial, dan integrasi dalam beragam kelompok¹¹. Dalam tradisi masyarakat Bugis, tiap bangsawan memiliki jaringan pengikut, dimana ketika seorang pengikut telah menyatakan daulat pada

¹⁰ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia* (Jakarta, Jambatan, 1985). hlm. 269.

¹¹ Chrstian Pelras, *Manusia Bugis* (Jakarta, Nalar, 2006), hlm. 203.

bangsawan maka secara otomatis ia terikat pula untuk mematuhi setiap perintah dari bangsawan (tuan).

Secara konteks kehidupan sosial, manfaat yang diperoleh klien bukan sekedar berupa terpenuhinya kebutuhan dirinya seperti makanan, tempat tinggal, atau hiburan, melainkan juga dalam hal primer seperti pertanian. Seorang patron secara beban moral bertugas untuk memfasilitasi kliennya mulai dari menyediakan lahan, serta perlengkapan yang dibutuhkan dalam pertanian/peternakan. Jika ternyata panen gagal, maka patron menyediakan padi atau menggantinya dengan komoditas yang lebih menjanjikan, agar klien dapat mempertahankan hidupnya.

Kemampuan patron dalam memberikan perlindungan serta menjamin kesejahteraan hidup klien membuat klien semakin taat, dan tergantung pada patron. Bagi patron sendiri, hal ini akan meningkatkan pengaruh serta kedudukannya dikalangan para klien¹². Sehingga dengan demikian, hubungan antara patron-klien ini tidak sebatas “ transaksi “ semata, melainkan sampai pada hubungan personal. Semisal ketika klien diperlakukan dengan sewenang-wenang, maka patron akan turun langsung membela. Karena prinsipnya, menyerang pengikut berarti sama dengan menyerang majikannya¹³.

Lahirnya sistem ini didasarkan atas beberapa faktor, *pertama* adalah sistem kekeluargaan bilateral yang dimana sistem patronase adalah hubungan kekerabatan yang terorganisir, seperti halnya marga atau klan yang dianut oleh masyarakat

¹² Mukhlis PaEni, *Batara Gowa : Mesianisme dalam Gerakan Sosial di Makassar* (Yogyakarta, Gadjah Mada Unirvesity Press, 2006). hlm. 41.

¹³ A.Rasyid Asba, *op.cit.* hlm. 53.

dengan sistem unilineal. Golongan klien seringkali diperkuat dalam tali perkawinan antar-anggota. *Kedua* adanya stratifikasi sosial yang memberi peluang pada golongan bangsawan untuk terlibat dalam perdagangan serta retribusi kekayaan. *Ketiga*, hubungan hierarkis yang tercipta antara wilayah-wilayah kecil dengan kerajaan besar di masa lampau. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana bangsawan mampu untuk menarik banyak simpati dari rakyatnya. Poin terakhir dijadikan sebagai sarana agar bagaimana bangsawan mampu menghadapi persaingan dengan bangsawan lain, dalam rangka menduduki jabatan politik di kerajaan¹⁴.

Mengacu pada analisis Pelras diatas, maka dapat dipahami bagaimana vitalnya posisi patron dalam konteks kaitan benang merah hubungan antara penguasa dan masyarakat. Maka tidak menjadi sebuah hal aneh ketika seorang penguasa maupun bangsawan menikahi orang dari “ kelas rendah “. Selain memberi pengaruh pada orang kelas rendah tersebut, seperti keturunannya nanti tetap berhak menyanggah status putera mahkota, dari sisi penguasa/bangsawan juga dapat memperluas pengaruhnya ke dalam bagian-bagian yang berada di luar jangkauannya.

Jaringan sistem politik ini menjadi berantakan ketika kolonial mengintervensi wilayah-wilayah di Sulawesi Selatan. Pemerintah kolonial melakukan upaya semacam “ injeksi “ secara paksa sistem politik dengan gaya baru, sehingga menggantikan tatanan tradisi yang sudah terbangun selama berabad-abad.

¹⁴ Christian Pelras, *op.cit.*

Penggantian model pemerintahan ini menjadi agenda utama kolonial pada masa itu, dengan tujuan tidak lain untuk memperkuat supremasinya di wilayah-wilayah yang telah diduduki